

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2024**



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN DELI SERDANG**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Kata Pengantar	2
BAB I	PENDAHULUAN.....3
	1.1 Latar Belakang 3
	1.2 Penjelasan Umum Organisasi 4
	1.3 Isu Strategis 6
	1.4 Dasar Hukum 7
	1.5 Sistematika Penyusunan 8
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....9
	2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..... 9
	2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024 10
	2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA..... 19
	3.1 Capaian Kinerja 19
	3.2 Realisasi Anggaran 36
BAB IV	PENUTUP 38

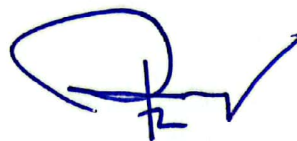
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKIP Dinas Sosial Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu instrumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuan menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Lubuk Pakam, 03 - 03 - 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN DELI SERDANG**



**RUDI AKMAL TAMBUNAN, ST, MAB
NIP.197904232009031003**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Sosial diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Dinas Sosial Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Sosial:

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

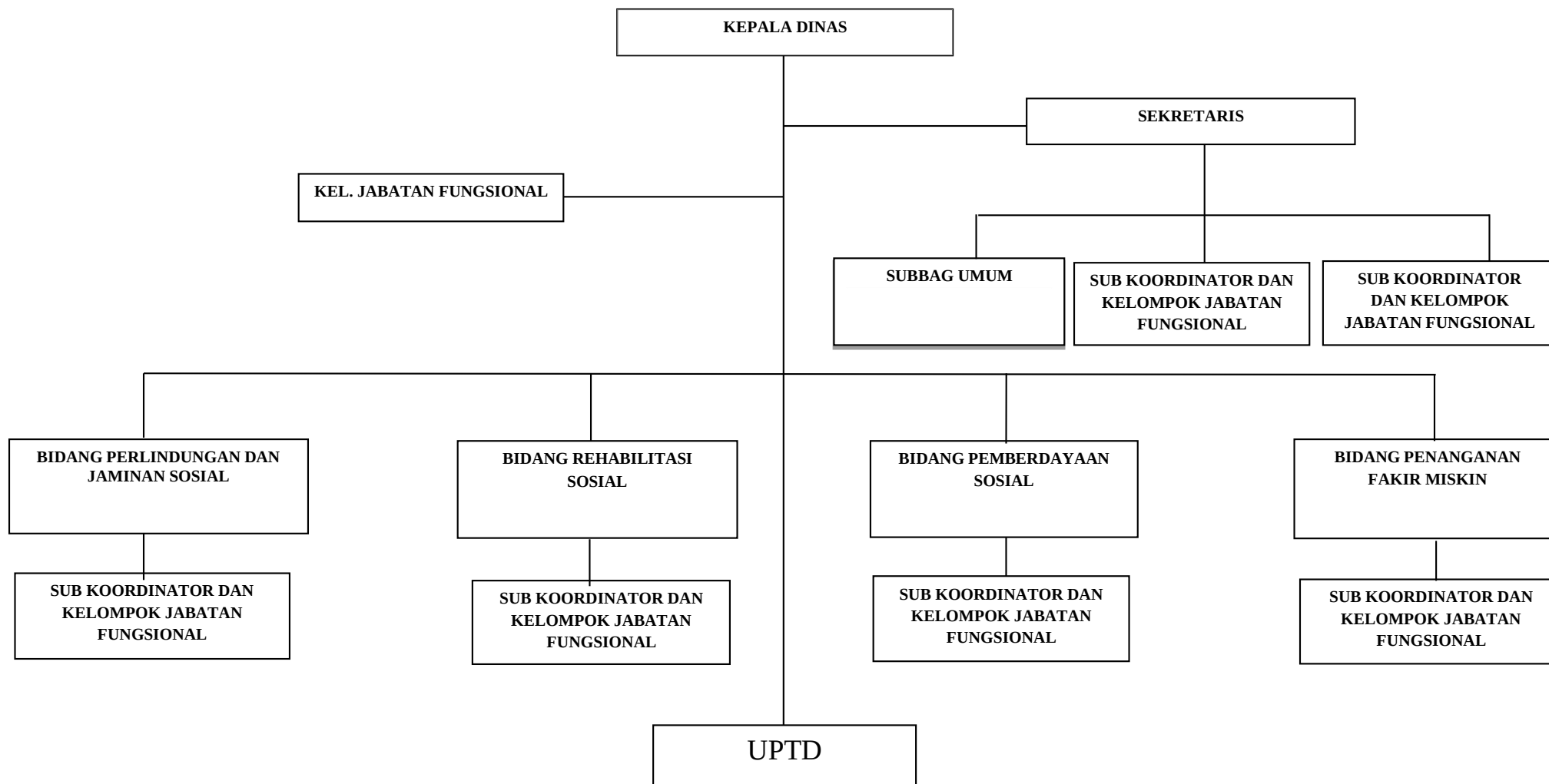
Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 86 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati Deli Serdang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang sosial
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang sosial
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan bidang sosial
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Sosial. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Sosial.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN DELI SERDANG



1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial:

Tabel 1.1
Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2023	Rp. 14.969.611.844
APBD	2024	Rp. 14.910.619.573

1.2.3 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir Desember 2024, Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang memiliki 22 orang PNS. Berdasarkan jenjang jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Personil Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang
Berdasarkan Jenjang Jabatan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Pejabat Struktural	9
	Eselon II	1
	Eselon III	5
	Eselon IV.b	2
	Eselon IV.a	1
2	Pejabat Fungsional	8
3	Pejabat Pelaksana	5
	Jumlah	22

1.3 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang mendasar dan menentukan pencapaian tujuan pembangunan perangkat daerah. Isu-isu strategis harus ditangani dengan serius, jika tidak akan menimbulkan kerugian yang cukup besar dan jika tidak segera dimanfaatkan maka Kabupaten

Deli Serdang akan kehilangan peluangnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Adapun isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang diantaranya :

1. Jumlah orang miskin masih banyak
2. Jumlah PMKS yang tidak memiliki keluarga semakin banyak
3. Perubahan aturan tentang manajemen ASN yang dinamis

1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Sosial ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Sosial adalah mewujudkan kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun
Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan Kesejahteraan bagi PMKS	Persentase PMKS Terlayani			75 %	77 %	80 %	83 %	88 %
			Meningkatnya Pelindungan bagi PMKS	Persentase PMKS yang Mendapat Penanganan	77 %	80 %	83 %	87 %	100 %
			Meningkatnya PSKS yang Baik dan Kompeten	Persentase PSKS yang Terakreditasi	73 %	75 %	76 %	79 %	85 %
2	Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			77 Poin	78 Poin	79 Poin	80 Poin	81 Poin
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	77 Poin	78 Poin	79 Poin	80 Poin	90 Poin
				2. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	70 Poin	72 Poin	74 Poin	76 Poin	81 Nilai

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Rumus
1	Mewujudkan Kesejahteraan bagi PMKS	Meningkatnya Perlindungan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Penanganan	$\frac{(\text{Jumlah Korban Bencana yang Ditangani} + \text{Jumlah PMKS Lainnya yang Ditangani})}{(\text{Jumlah Korban Bencana yang Dilaporkan} + \text{Jumlah PMKS Lainnya yang Dilaporkan})} \times 100\%$
		Meningkatnya PSKS yang Baik dan Kompeten	Persentase PSKS yang Terakreditasi	$\frac{(\text{Jumlah LKS yang Terakreditasi} / \text{Jumlah LKS yang Terdaftar}) + (\text{Jumlah TKSK yang sudah Memiliki Sertifikat Relawan Sosial} / \text{Jumlah TKSK}) + (\text{Jumlah Karang Taruna Kabupaten dan Kecamatan yang memiliki Pengurus yang Memiliki Sertifikat Relawan Sosial} / \text{Jumlah Karang Taruna Kabupaten dan Kecamatan})}{3} \times 100\%$
2	Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{(\text{Total dari Nilai Persepsi perUnsur/Total Unsur yang Terisi})}{\text{Nilai Penimbang}}$
			2. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	$\text{Nilai Perencanaan Kinerja (15\%)} + \text{Nilai Pengukuran Kinerja (12,5\%)} + \text{Nilai Pelaporan Kinerja (7,5\%)}$

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Sosial

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Thn 2024
			Target Capaian Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	406 OB
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48 Paket
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
2	Program Pemberdayaan Sosial		
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Lembaga
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Sertifikat
3	Program Rehabilitasi Sosial		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		

	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan KAbupaten/Kota	12 Orang
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakie Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	440.000 Orang

	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	69.000 Keluarga
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.048 Orang
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang
5	Program Penanganan Bencana		
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2.000 Orang
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2.000 Orang
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Unit
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	2.000 Orang
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang

6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Sosial tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Target
1	Meningkatnya Perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Mendapatkan Penanganan	100 %
2	Meningkatnya PSKS yang Baik dan Kompeten	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi	85 %
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Poin
		2. LHE AKIP	81 Nilai

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan beserta alokasi anggarannya :

Tabel 2.5
Program, Kegiatan, Beserta Alokasi Anggaran Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.259.081.347
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 292.695.054
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.982.755.828
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 30.403.200
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.019.799.174
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 273.597.512
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.783.210.196
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 876.620.383
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 1.185.381.168
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.185.381.168
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 507.538.980
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 484.098.540
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp. 23.440.440
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 3.255.599.976
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.255.599.976
5	Program Penanganan Bencana	Rp. 609.917.140
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 403.873.700
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 206.043.440

6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 93.100.962
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 93.100.962
	JUMLAH	Rp. 14.910.619.573

Tabel 2.6

Rencana Anggaran Dinas Sosial Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)
I	Belanja Operasi	Rp. 13.948.553.829
	Belanja Pegawai	Rp. 4.847.242.902
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 8.114.460.927
	Belanja Hibah	Rp. 307.200.000
	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 679.650.000
II	Belanja Modal	Rp. 962.065.744
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 552.397.744
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 359.668.000
	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 50.000.000
	JUMLAH BELANJA	Rp. 14.910.619.573

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kemampuan suatu organisasi atau individu untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pihak yang berkepentingan, masyarakat atau pemerintah. Dinas Sosial selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Sosial.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial tahun 2024 berdasarkan berita acara reviu renstra tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Berdasarkan Berita Acara Reviu Renstra
Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024	
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja
Persentase PMKS yang Mendapat Penanganan	%	100	100
Persentase PSKS yang Terakreditasi	%	100	62,8
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	90	90,5
Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	73,6

Dalam pencapaian kinerja Dinas Sosial ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung setiap indikator kinerja sasaran pada renstra Dinas Sosial guna mencapai hasil yang maksimal.

Tabel 3.2
Indikator Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Persentase PMKS yang Mendapat Penanganan	%	100	100

Persentase PMKS yang mendapat penanganan dengan rata-rata capaian 100%. Untuk dapat melaksanakan penanganan terhadap PMKS ada beberapa kegiatan yang mendukung antara lain :

1. Dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Kabupaten Deli Serdang Hari Jumat Tanggal 20 Desember 2024 bertempat di Gedung Balairung Pemkab Deli Serdang Dinas Sosial memberikan bantuan alat bantu kursi roda dan kaki palsu kepada penyandang disabilitas. Bantuan yang diserahkan kepada 26 orang penyandang disabilitas berupa :
 - a. Kursi Roda : 13 Unit
 - b. Kaki Palsu : 6 Unit
 - c. Sepatu AFO : 7 Unit

Tabel 3.3
Nama Penerima Bantuan Alat Bantu

No	NAMA PENERIMA	ALAT BANTU	KECAMATAN
1	Setioso Aji	Kursi Roda	Biru-Biru
2	Ade Paranita	Kursi Roda	Biru-Biru
3	Wandiyem	Kursi Roda	Galang
4	Japsen Sipayung	Kursi Roda	Gunung Meriah
5	Legiman Sembiring	Kursi Roda	Kutalimbaru
6	Kontan Barus	Kursi Roda	Kutalimbaru
7	Jaiman Samosir	Kursi Roda	Lubuk Pakam
8	Reynhardt Siburian	Kursi Roda	Lubuk Pakam
9	Jailer Rajagukguk	Kursi Roda	Lubuk Pakam
10	Sri Maelani	Kursi Roda	Tanjung Morawa
11	Dame Hutasoit	Kursi Roda	Lubuk Pakam
12	Sukiyem	Kursi Roda	Tanjung Morawa
13	Inem	Kursi Roda	Tanjung Morawa
14	Dedi Heriawan	Kaki Palsu	Patumbak
15	Sekarta Heri Sembiring	Kaki Palsu	Biru-Biru
16	Selo Purba	Kaki Palsu	Bagun Purba
17	Mara Sonang Siregar	Kaki Palsu	Tanjung Morawa
18	Dedi	Kaki Palsu	Beringin
19	Surya Nanda	Kaki Palsu	Batang Kuis
20	Muhammad Usman Rais	Sepatu AFO	Lubuk Pakam
21	Mutya Zahra	Sepatu AFO	Lubuk Pakam
22	Hilal Presetia Sinulingga	Sepatu AFO	Galang
23	Husairi Akhyar Ramib	Sepatu AFO	Batang Kuis
24	Muhammad Shaky Abhinara	Sepatu AFO	Lubuk Pakam
25	Nazwa Keyla Alya	Sepatu AFO	Lubuk Pakam
26	Alby Alhafiz	Sepatu AFO	Batang Kuis



2. Pemberian bantuan terhadap korban bencana alam dan sosial yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 3.4

Daftar Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

No	Tanggal	Jenis Bencana	Kecamatan	Jumlah Korban/KK
1	11 Februari 2024	Angin Puting Beliung	Tanjung Morawa	3
2	20 Februari 2024	Angin Puting Beliung	Hamparan Perak	1
3	16 Maret 2024	Angin Puting Beliung	Batang Kuis	1
4	30 Maret 2024	Banjir	Sunggal	60
5	30 Maret 2024	Angin Puting Beliung	Tanjung Morawa	2
6	30 Maret 2024	Angin Puting Beliung	Pagar Merbau	12

7	07 Mei 2024	Angin Puting Beliung	Pantai Labu	13
8	20 Juni 2024	Angin Puting Beliung	Hamparan Perak	1
9	27 Juni 2024	Angin Puting Beliung	Bangun Purba	6
10	29 Juni 2024	Angin Puting Beliung	Percut Sei Tuan	3
11	7 September 2024	Banjir	Hamparan Perak	218
12	18 September 2024	Banjir	Pantai Labu	95
13	09 Oktober 2024	Banjir	Batang Kuis	300
14	02 Nopember 2024	Banjir	Hamparan Perak	300
15	23 Nopember 2024	Banjir	Sibolangit	30
16	27 Nopember 2024	Banjir	Patumbak	200
17	27 Nopember 2024	Banjir	Sunggal	143
18	27 Nopember 2024	Banjir	Batang Kuis	200
19	27 Nopember 2024	Banjir	Hamparan Perak	80
20	27 Nopember 2024	Banjir	Percut Seituan	2064
21	27 Nopember 2024	Banjir	Percut Seituan	22
22	22 Desember 2023	Kebakaran	Sunggal	1
23	02 Januari 2024	Kebakaran	Biru-Biru	2
24	20 Desember 2023	Kebakaran	Percut Sei Tuan	1
25	15 Januari 2024	Kebakaran	Pancur Batu	1
26	22 Januari 2024	Kebakaran	Sunggal	3
27	10 Februari 2024	Kebakaran	Tanjung Morawa	1
28	29 Januari 2024	Kebakaran	Sunggal	3
29	17 Februari 2024	Kebakaran	Galang	1
30	13 Maret 2024	Kebakaran	Biru-Biru	3
31	18 Mei 2024	Kebakaran	Sei Rotan	5
32	17 Mei 2024	Kebakaran	Sambirejo Timur	2
33	21 Mei 2024	Kebakaran	Sidodadi	3
34	26 Mei 2024	Kebakaran	Buntu Bedimbar	2
35	27 Mei 2024	Kebakaran	Tanjung Sari	1
36	11 Juni 2024	Kebakaran	Suka Makmur	8
37	01 Juli 2024	Kebakaran	Percut	1
38	03 Juli 2024	Kebakaran	Telaga Sari	1
39	25 Juli 2024	Kebakaran	Bangun Purba	2
40	05 Agustus 2024	Kebakaran	Bangun Purba	1
41	07 Agustus 2024	Kebakaran	Sibolangit	2
42	05 Agustus 2024	Kebakaran	Tanjung Morawa	4
43	18 Agustus 2024	Kebakaran	Pantai Labu	1
44	03 September 2024	Kebakaran	Patumbak	6
45	21 September 2024	Kebakaran	Tanjung Morawa	1
46	24 September 2024	Kebakaran	Kutalimbaru	1
47	20 Oktober 2024	Kebakaran	Percut Sei Tuan	25

Tabel 3.5
Indikator Sasaran 2

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Persentase PSKS yang Terakreditasi/Memiliki Sertifikat	%	100	62,8

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial yaitu masih tingginya jumlah PMKS yang belum tertangani dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan maksimal. PSKS sebagai pilar pembangunan kesejahteraan sosial sangat diperlukan dalam membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Ada beberapa PSKS yang mendukung kinerja Dinas Sosial yaitu :

1. **Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)** adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Tujuan pendirian LKS sebagai wujud peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. secara umum LKS memiliki peran :
 1. Mencegah terjadinya masalah sosial
 2. Memberikan pelayanan sosial kepada PMKS / PPKS
 3. Menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga

Berdasarkan typenya, LKS dibagi menjadi 4 type yang diantaranya:

1. Type D (Embrio) artinya belum memenuhi standar kelembagaan dan pelayanan, masih perlu bantuan untuk memnuhistandar minimal dan perolehan nilai dibawah 40%.
2. Type C (Tumbuh) artinya telah memnuhi sebagian standar kelembagaan dan pelayanan, masih perlu pendampingan untuk pengembangannya, perolehan nilai antara 40,0% - 60,0%.
3. Type B (Berkembang) artinya telah memenuhi sebagianbesar standar kelembagaan dan pelayanan, memiliki potensi untuk dikembang-tingkatkan, perolehan nilai antara 60,0% - 80,0%.

4. Type A (Mandiri) artinya telah memenuhi standar kelembagaan dan pelayanan, tidak bergantung pada bantuan pemerintah, dapat dijadikan contoh, perolehan nilai atas 80%.

Kabupaten Deli Serdang memiliki 64 LKS terakreditasi yang tersebar di beberapa Kecamatan yaitu :

Tabel 3.6
Nama-nama LKS yang Terakreditasi

NO	NAMA PANTI	KECAMATAN	AKREDITASI
1	Yayasan Babussalam Nurul Hikmah	Batang Kuis	C
2	Yayasan Rahmani Kasih	Beringin	B
3	Yayasan Anugrah Terindah	Beringin	C
4	Yayasan Amelia Sumatera Utara	Beringin	B
5	Yayasan Bimbingan Kasih Sejahtera	Galang	C
6	Yayasan Adonai Cinta Anak Nusantara	Namorambe	A
7	Yayasan Ortodoks Koptik Di Indonesia	Namorambe	C
8	LKSA Melati Aisyiyah	Percut Sei Tuan	B
9	PA.Yayasan Anugrah Kasih Abadi	Percut Sei Tuan	C
10	PA.Yayasan Glori Sinabung	Percut Sei Tuan	C
11	Asrama/Panti Asuhan SLB-C Santa Lusia	Percut Sei Tuan	A
12	Yayasan Fokus Belajar Mandiri (FOBEMA)	Percut Sei Tuan	B
13	Yayasan Lestari Sumut Indonesia	Percut Sei Tuan	C
14	Yayasan Vallery Bonaventure Indonesia	Percut Sei Tuan	C
15	Yayasan Kasih Nurani Indonesia	Percut Sei Tuan	C
16	Panti/Asrama SLB-C Karya Tulus	Pancur Batu	B

17	Yayasan Kasih Tulus	Pancur Batu	C
18	Panti Asuhan Anugrah Sungai Air Hidup	Pancur Batu	C
19	Yayasan Bukit Doa Rumahku	Pancur Batu	A
20	LKSA Bukit Doa	Pancur Batu	B
21	Yayasan Pondok Trenkely	Pancur Batu	B
22	Yayasan Medan Plus Stakoetoe Sarenity	Pancur Batu	A
23	Yayasan Susaint Pancur Batu	Pancur Batu	C
24	PA.Rapha-El	Pancur Batu	B
25	Yayasan Pelayanan orang Tua Sejahtera	Sibolangit	A
26	Yayasan Getsemane	Sibolangit	C
27	PA.Gelora Kasih	Sibolangit	C
28	Yayasan Sibolangit Centre	Sibolangit	B
29	Panti Asuhan Betlehem	Sibolangit	B
30	PA.Putra Muhammadiyah Cabang Helvetia	Sunggal	C
31	Yayasan Taman Bodhi Asri	Sunggal	A
32	Yayasan untu Anak Mandiri	Sunggal	A
33	Yayasan Panti Asuhan Anugrah Linda Indonesia	Sunggal	C
34	LKSA Terang Sukacita Abadi	Sunggal	C
35	Panti Asuhan Nain Karya Sentosa	Sunggal	C
36	Yayasan Bahri Nusantara (BANTARA)	Sunggal	B
37	Panti Asuhan Elsadai Indonesia	Sunggal	C
38	PA.Muhammadiyah Medan Krio	Sunggal	C
39	Yayasan Pendidikan Tunanetra Sumatera (YAPENTRA)	Tanjung Morawa	C

40	Panti Rehabilitasi Tradisional Yayasan Datuk Etam	Tanjung Morawa	C
41	PA Madinatul Munawaroh	Tanjung Morawa	B
42	Yayasan Kerukunan Komunitas Shalom	Tanjung Morawa	C
43	Yayasan Al Hasannah	Tanjung Morawa	B
44	Yayasan Dorema Nusantara	Hamparan Perak	C
45	Yayasan Menabur Cinta Kasih	Hamparan Perak	C
46	Yayasan Sarah Kasih Setia	Hamparan Perak	C
47	Yayasan Eka Darma Bakti	Hamparan Perak	B
48	PA.Sahabat Anak Indonesia	Hamparan Perak	B
49	Panti Asuhan Al Jamiyatul Washliyah	Lubuk Pakam	B
50	Yayasan Caritas PSE KAM	Lubuk Pakam	A
51	Yayasan Istana Harta Lima Penjuru	Lubuk Pakam	C
52	Pa.Muhammadiyah Umar Bin Khatab Cabang Lubuk Pakam	Lubuk Pakam	C
53	Yayasan Generasi Penerus Anak Emas Indonesia	Labuhan Deli	B
54	Yayasan Elim Sejahtera	Labuhan Deli	C
55	Yayasan Bagus Joro Moria Lamganda	Deli Tua	C
56	Yayasan Siskolinora/Santa Angela	Deli Tua	B
57	Yayasan Karya Darma	Patumbak	B
58	Yayasan Cinta Kasih Kita	Patumbak	C
59	Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia	Patumbak	B
60	Panti Asuhan AL-Munawwaroh	Patumbak	C
61	Yayasan Kasih Insan Tanah Air Indonesia (KITA INDONESIA)	Patumbak	B
62	Yayasan Rehabilitasi Penyalagunaan NAPZA (NAZAR)	Patumbak	B

63	Yayasan Nurani Luhur Masyarakat	Pantai Labu	C
64	Yayasan Kasih Hati dan Pikiran (KAHAPI)	Pantai Labu	C

2. **Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)** adalah seorang yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan. TKSK berkedudukan ditingkat Kecamatan dan tiap kecamatan ada 1 (satu) orang TKSK. Pada tahun 2024 Kabupaten Deli Serdang memiliki 21 orang TKSK yang membantu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan menjadi perpanjangan tangan Dinas Sosial di Kecamatan dan 1 Kecamatan masih kosong dikarenakan TKSK sebelumnya telah pensiun, namun hanya 4 (empat) orang yang memiliki sertifikat profesi yakni sebagai berikut :

Tabel 3.7
Nama-nama TKSK Kabupaten Deli Serdang

NO	NAMA	KECAMATAN	NOMOR HP
1.	Indra Yansyah Siregar, SH.I	Beringin	085275367001
2.	Sutris	Bangun Purba	081313647071
3.	Akhmad Abil	Batang kuis	081361462717
4.	Novita Megawaty	Gunung Meriah	081370092525
5.	Zet Kadrillah	Tanjung Morawa	085296164695
6.	Virida Yanti Gurusinga	Sibolangit	082180702124
7.	Bahagia	Kutalimbaru	081260809624
8.	Hasanul Ansari	Pancur Batu	081265335378
9.	Rijali Tores Keliat	Namorambe	085262002652
10.	Tertib Sembiring	Biru-Biru	081260070280
11.	Andri Gabriel Barus	STM Hilir	081211781360
12.	Candra Purnama, ST	Galang	081375685155
13.	Fedry Ronaldo	STM Hulu	082285928832
14.	Muhammad Iqbal, S.Sos	Patumbak	081314114867

15.	Sudarso	Deli tua	085360811969
16.	Selamet Riyadi	Sunggal	082365755692
17.	Tri Era Wahyudi, SH	Hamparan Perak	081264785889
18.	Hengki Irawan, SE	Labuhan Deli	081376421567
19.	Ade Rizki Prayuda	Lubuk Pakam	085664065681
20.	Muhammad Fakhri Sipayung	Pagar Merbau	085270097877
21.	Rivaldi Pranata	Pantai Labu	081396843104



Tabel 3.8
Indikator Sasaran 3

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	90	90,5

Pelayanan Publik (Public Service) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan public oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk

mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari satu negara kesejahteraan (welfarestate). Dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara telah ditetapkan.

Berbagai cara telah ditempuh atau dilakukan guna memperbaiki pelayanan public oleh setiap instansi Pemerintah, namun penyelenggaraan pelayanan publik masih tetap menjadi keluhan masyarakat karena tidak sesuai keinginan masyarakat. Seluruh pendekatan yang dipergunakan selama ini dalam upaya perbaikan pelayanan hanya berdasarkan kepada perintah sebagai penyedia layanan semata-mata tidak dipadukan dengan keinginan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pelayanan publik bukan hanya merupakan persoalan administrasi tetapi lebih tinggi dari itu yaitu pemenuhan keinginan dari publik. Ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat berdasarkan persepsi mereka terhadap indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang. Adapun faktor yang dapat dipertimbangkan oleh pengguna dalam menilai suatu pelayanan yaitu dapat dipercaya, murah, memuaskan, kecepatan waktu. Berikut laporan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Dinas Sosial tahun 2024 :

Tabel 3.9

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM DINAS SOSIAL TAHUN 2024

NRR Per Unsur			
No.	Unsur Pelayanan	Actual Masyarakat	
		Indeks Konversi	Mutu
1.	Persyaratan Pelayanan	3.5563	A
2.	Prosedur Pelayanan	3.5086	B
3.	Waktu Pelayanan	3.5031	B
4.	Biaya/Tarif Pelayanan	3.9335	A
5.	Produk Jenis Layanan	3.5618	A
6.	Kompetensi Pelaksana	3.5274	B

7.	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3.597	A
8.	Sarana dan Prasarana	3.5501	A
9.	Penanganan Pengaduan, Saran	3.856	A

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DINAS
SOSIAL KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2024**

NILAI IKM 90,5	RESPONDEN - Jumlah : 1.278 - Pekerjaan : • PNS/TNI/POLRI : 0 • Pegawai Swasta : 8 • Wiraswasta/Usahawan : 142 • Pelajar/Mahasiswa : 142 • Lainnya - Jenis Kelamin : 704 • Laki-laki • Perempuan - Pendidikan : • SD : 218 • SLTP : 343 • SLTA : 692 • D1-D2-D3 : 18 • S1 : 4 • S2 : 3 - Umur PERIODE SURVEI TAHUN 2023
--	--

A (Sangat Baik)

Tabel 3.10
Indikator Sasaran 3

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	73,6

Tim evaluasi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dengan berpedoman pada Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), yang secara keseluruhan hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 masuk dalam kategori **sangat baik** dengan predikat **BB (73,6)**.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut

Tabel 3.11
Perbandingan anantara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
Persentase PMKS yang Mendapat Penanganan	%	83	54	100	85	100	100
Persentase PSKS yang Terakreditasi	%	76	65	80	29	100	31,2
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	79	86	90	85	90	90,5
Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	74	67	80	79	81	73,6
Persentase Penggunaan Anggaran yang Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan	%	-	-	85	60	85	57,08

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Renstra Tahun 2019-2024

Berikut disampaikan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target renstra tahun 2019-2024 :

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Renstra Tahun 2019-2024.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target Renstra	Realisasi	Target Renstra	Realisasi	Target Renstra	Realisasi		
1	Meningkatnya Perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Mendapatkan Penanganan	83 %	54 %	100 %	82 %	100%	100%	100 %	100
2	Meningkatnya PSKS yang Kompeten	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi	76 %	65 %	80 %	29 %	85%	62,8%	85 %	73,9
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	79 Poin	86 Poin	90 Poin	85 Poin	90 Poin	90,5 Poin	92 Poin	101
		2. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	74 Poin	67 Poin	80 Poin	79 Poin	81 Nilai	73,6 Nilai	81 Poin	91

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Ada 3 sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 yaitu :

1. Meningkatnya Perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Kompeten
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian target kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2024 tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor pendorong dan faktor penghambat sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong antara lain :

- Koordinasi dan Komunikasi yang baik dan intensif dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Kementrian Sosial RI
- Adanya komitmen dan perhatian yang tinggi dari Kepala Daerah dan Badan Legislatif dalam menuntaskan permasalahan sosial di Kabupaten Deli Serdang
- Partisipasi aktif dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kabupaten Deli Serdang dalam menanggulangi permasalahan PMKS di Kabupaten Deli Serdang.

2. Faktor Penghambat/Ketidakberhasilan antara lain :

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang bila dibandingkan dengan jumlah dan kriteria PMKS
- Keterbatasan anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sehingga target sasaran tidak tercapai

3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari satu sasaran strategis Dinas Sosial, capaian strategis kinerja Dinas Sosial meningkat dan telah mencapai 50% dengan capaian anggaran program dan kegiatan penunjang capaian sasaran kinerja Dinas Sosial mencapai 57,08%. Ketercapaian program/kegiatan untuk mencapai sasaran telah mencapai nilai yang cukup baik hal ini menunjukkan adanya sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral bidang dalam mencapai sasaran kinerja Dinas Sosial.

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk tahun 2024.

Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Perlindungan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapat Penanganan	100	40,34	40,34
2	Meningkatnya PSKS yang Baik dan Kompeten	Persentase PSKS yang Terakreditasi /Memiliki Sertifikat	62,8	43,28	47,82
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5	59,92	66,20
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	73,6	6,96	9,45

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dinas Sosial telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial antara lain belum optimalnya koordinasi dengan OPD dan sektor lain terkait penanganan PMKS, belum adanya data PMKS yang akurat, dan sarana prasarana yang masih harus ditingkatkan untuk pelayanan PMKS.

Program dan Kegiatan Dinas Sosial di Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Admiistrasi Umum Perangkat Daerah;

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pemberdayaan Sosial
- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Rehabilitasi Sosial
- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Penanganan Bencana
- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;
 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- Pemeliharaan Taman Makam Nasional Kabupaten/Kota.

3.2 Realisasi Anggaran

Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial yang di jabarkan dalam 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan.

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I	Belanja Daerah	Rp. 14.910.619.573	Rp. 8.510.719.985	57,08
1	Belanja Operasi	Rp. 13.948.553.829	Rp. 8.287.769.985	59,42
	Belanja Pegawai	Rp. 4.847.242.902	Rp. 3.760.228.723	77,57
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 8.114.460.927	Rp. 4.390.667.412	54,11
	Belanja Hibah	Rp. 307.200.000	Rp. 56.623.850	18,43
	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 679.650.000	Rp. 80.250.000	11,81
2	Belanja Modal	Rp. 962.065.744	Rp. 222.950.000	23,17
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 552.397.744	Rp. 222.950.000	40,36
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 359.668.000	Rp. 0	0
	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 50.000.000	Rp. 0	0

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan LKIP ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik khususnya terhadap kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dan mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang pada umumnya. Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 3 (tiga) sasaran Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang selama Tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang 2019 – 2024 sebagaimana telah ditargetkan.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2024 **Rp. 14.910.619.573** dan dari jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp. 8.510.719.985** atau **57.08%**.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai capaian maupun yang tidak tercapai Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang akan melakukan langkah-langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2024 menjadi catatan yang tentunya akan terjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Tahun 2024 telah disusun dan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan bagi perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Lubuk Pakam, 03 - 03 - 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN DELI SERDANG**



**RUDI AKMAL TAMBUNAN, ST, MAB
PEMBINA TK.I
NIP. 19790423 200903 1 003**